

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hlm 326.
- Djunedi, Achmad. 1999. Perkembangan Perencanaan Kota di Malaysia dan Indonesia (Studi Komparatif). Laporan Penelitian. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Djunaedi, Achmad. 2012. Proses Perencanaan Wilayah dan Kota. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djunaedi, Achmad. 2014. Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farida, Maria S. 1998. Ilmu Perundang - undangan Dasar - Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius. hlm 10-11.
- Free Online Dictionary: Evolution. American Heritage Dictionary 2004. Fourth Edition. www.thefreedictionary.com/evolution. Diakses 7 Oktober 2014.
- Free Online Dictionary: Evolution Thesaurus. Collin Essential Thesaurus 2nd Edition 2006 © HarperCollins Publishers 2005, 2006. www.thefreedictionary.com/evolution. Diakses 7 Oktober 2014.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 650-1232 tentang Pelaksanaan Permendagri Nomor 4 Tahun 1980.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 650-1233 tentang Tata Kerja Penyusunan Rencana Kota.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 2 Tahun 1987.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan dan Perhitungan Biaya Rencana Tata Ruang di Daerah.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota.

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang.

Manan, B. dan Magnar, K. 1987. Peraturan Perundang - undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Armico. hlm 13.

Manan, B. dan Magnar, K. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni. hlm 125.

Mikkelsen, Britha. 1999. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya – upaya Pemberdayaan: Sebuah Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Otonomi Daerah di Indonesia. <https://id.wikipedia.org>. Diakses 1 Mei 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2012 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta
Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI). Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.

Roosmalen, Pauline K. M. 2002. Sejarah Penataan Ruang Indonesia.
<http://penataanruang.pu.go.id/01-1.asp>. Diakses 13 Januari 2015.

Renyansih. 2002. Sejarah Penataan Ruang Indonesia.

<http://penataanruang.pu.go.id/01-1.asp>. Diakses 13 Januari 2015.

Renyansih & Budisantoso. 2002. Sejarah Penataan Ruang Indonesia.

<http://penataanruang.pu.go.id/01-1.asp>. Diakses 13 Januari 2015.

Rico, Handiman. Kebijakan Nasional dalam Perencanaan Tata Ruang
”merealisasikan hak partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata
ruang” . Divisi Riset JKPP – Bogor. BIG _ Bersama Menata Indonesia
Yang Lebih Baik bakosurtanal.go.id. Diakses 12 September 2015.

Sapaah, Susi S. 2011. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia.

<http://susisitisapaah.blogspot.co.id>. Diakses 1 Mei 2015.

Soebechi, Imam. 2012. Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah.
Jakarta: Sinar Grafika. hlm 158.

Soefaat. 2002. Sejarah Penataan Ruang Indonesia.

<http://penataanruang.pu.go.id/01-1.asp>. Diakses 13 Januari 2015.

SOP NAS. 2000. Pendidikan dan Praktik Perencanaan Wilayah & Kota di
Indonesia: Perkembangan dari Masa ke Masa dan Kecenderungan
Kebutuhan di Masa Depan. Laporan Needs Assessment Study Schools of
Planning (NAS SOP) 1998-1999. Yogyakarta: Tim NAS SOP d/a
Program MPKD UGM.

Suprayoga, Gede B. 2008. Merunut Sejarah Perencanaan Kota di Indonesia.

<http://gedebudi.wordpress.com>. Diakses 9 Maret 2015.

Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan
Umum Tahun 1985 Nomor 650-1595 dan 503/KPTS/1985 tentang Tugas
- tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 650/2109/Bangda/1988 tentang
Petunjuk Pemantapan Penyiapan Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pemeliharaan P3KT.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 650/1164/Bangda/1988 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kota Ibukota Kabupaten.

Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR.

Undang - Undang Dasar 1945.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan sebagai pengganti Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wirasaputri, Nina Mirantie. 2006. Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup di Wilayah Propinsi Jawa Tengah. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

Warseno, 2002, Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah Kajian Konsep dan Pengembangan, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah (P2KTPW)-BPPT, Jakarta.

Yin, Robert K. 2011. Qualitative Research From Start to Finish. New York: The Guilford Press.

Zulkaidi, Denny. 1995. Meninjau Kembali Persoalan Hukum Kerangka Peraturan Penataan Ruang Kota di Indonesia. Jurnal PWK. Institut Teknologi Bandung. Bandung.